

VISI – MISI 2021-2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



VISI

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”



VISI – MISI 2021-2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



MISI

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RPJMD 2021-2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TUJUAN



Meningkatkan Fasilitas instansi terkait dalam
Penyelesaian permasalahan pelaksanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.



Meningkatkan pengkoordinasian kebijakan
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah sumber dana APBD
dan APBN



Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pembangunan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan Pembangunan Daerah



Meningkatkan
pengendalian
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
Daerah.

BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PAPPD)

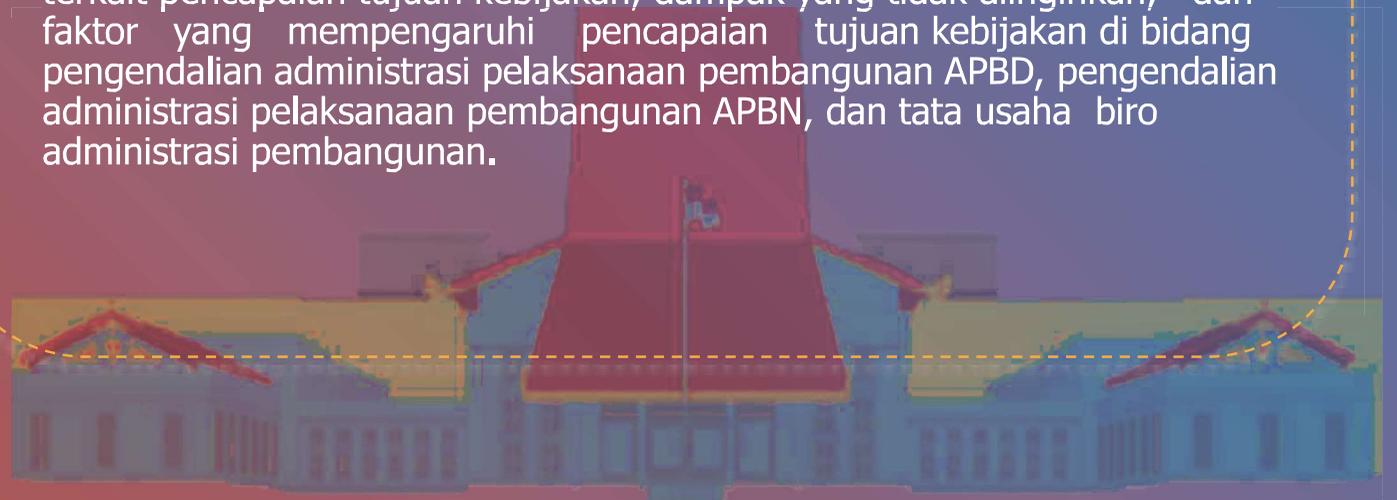


TUGAS

melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha biro administrasi pembangunan

FUNGSI

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha biro administrasi pembangunan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha biro administrasi pembangunan;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha biro administrasi pembangunan.



SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD



Monitoring/evaluasi
Pembangunan Sumber
dana APBD Provinsi



Rapat Koordinasi di
Lingkungan Pemprov.
Kalsel

MENGHASILKAN

1

Surat Teguran Keterlambatan Penyerapan
Realisasi Dana APBD kepada SKPD di
Lingkungan Pemrov Kalsel

2

Data Progress Pembangunan Sumber
dana APBD Provinsi

SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN



Melakukan pemantauan realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi OMSPAN dari Kanwil Perbendaharaan



Monitoring/evaluasi dana APBD (Dekon/TP) & Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota



Rekonsiliasi dana DAK dengan SKPD terkait

Menghasilkan

1

Dokumen Rekonsiliasi Dana DAK

2

Data Progress Pembangunan Sumber dana APBN

3

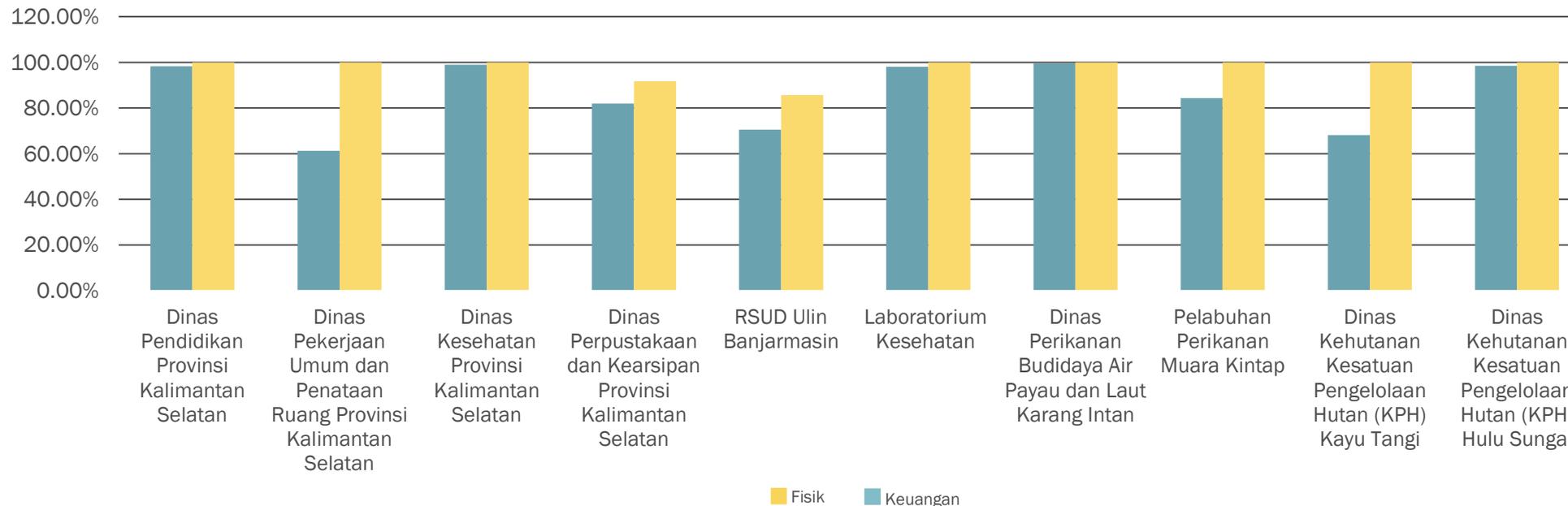
Surat Teguran APBD kepada SKPD yang terlambat progress realisasi fisik dan keuangan

Realisasi DAK Fisik Tahun 2022

No.	SKPD	PAGU	REALISASI	PRESENTASE	
				KEUANGAN	FISIK
1	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	116,951,377,000	114,933,938,719	98.27%	100%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	95,378,476,000	58,374,729,967	61.20%	100%
3	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	5,165,674,806	5,113,657,598	98.99%	100%
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	502,253,000	411,903,692	82.01%	91.67%
5	RSUD Ulin Banjarmasin	20,224,749,842	14,269,700,460	70.56%	85.71%
6	Laboratorium Kesehatan	5,250,000,000	5,144,800,800	98.00%	100%
7	Dinas Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan	115,500,000	114,978,130	99.55%	100%
8	Pelabuhan Perikanan Muara Kintap	8,613,850,000	7,264,532,604	84.34%	100%
9	Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi	999,444,200	680,583,400	68.10%	100%
10	Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai	199,993,000	197,037,298	98.52%	100%
Total		253,401,317,848	206,505,862,668	81.49%	100%



Alokasi :
Rp. 253.401.317.848,-
Realisasi :
Rp. 206.505.862.668,-
(81,49%)



Realisasi Satker Tertinggi

Realisasi Dinas Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan Sebesar 99,55% dari pagu atau sebesar Rp. 114.978.130,-

Realisasi Satker Terendah

Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Sebesar 61,20% dari pagu atau sebesar Rp.58.374.729.967,-